

**E-FISH PAY (ELECTRONIC FISH PAY)
KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU**

Asmaul Husna¹ dan Diki²

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang

² Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang

Email: asmaulhusna1771@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana kondisi perekonomian masyarakat pesisir? bagaimana implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terhadap masyarakat pesisir? Dan bagaimana inovasi *E-fish pay* dapat dikatakan sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir? peneliti berusaha untuk menggali bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di wilayah Kelurahan Sei Enam khususnya perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tangka karena masih rendahnya taraf perekonomian masyarakat sekitar tersebut, sementara hasil tangkapan di wilayah tersebut merupakan hasil tangkapan terbesar di Kabupaten Bintan. Melalui GNNT diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Dalam konsep *E-Fish Pay*, cara kerja *investment* adalah dengan menyisihkan 10% dari penghasilan nelayan yang melakukan transaksi jual beli melalui sistem *E-Fish Pay*. Namun untuk *investment* ini penghasilan yang telah disisihkan oleh nelayan hanya boleh di tarik atau digunakan untuk kelangsungan perekonomian nelayan, misal untuk pembuatan keramba atau membuka usaha-usaha yang akan dijalankan oleh nelayan selama tidak melaut.

Kata Kunci: Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), e-fish pay

ABSTRACT

The purpose of this study is how are the economic conditions of coastal communities? How is the implementation of the Less Cash Society (GNNT) for coastal communities? And how can E-fish pay innovation to be said as a solution to improve the economy of coastal communities? The researcher tried to explore how the economic condition of the community in the Sei Enam Village, especially the economy of the community who worked as tangka fishermen due to the low economic level of the surrounding community, while the catch in the area was the biggest catch in Bintan Regency. Through GNNT, it is expected to accelerate the use of non-cash payment instruments that have been attempted by Bank Indonesia from a number of previous years. In the E-Fish Pay concept, the way investment works is by setting aside 10% of the income of fishermen who make buying and selling transactions through the E-Fish Pay system. However, for this investment the income that has been set aside by fishermen may only be withdrawn or used for the economic survival of fishermen, for example for making cages or opening businesses that will be run by fishermen while not fishing.

Keywords: less cash society, gnnt, e-fish pay

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.000 pulau (DKN 2016), perairan laut sebesar 5,9 juta km², perairan darat sebesar 1,9 juta km², dan panjang garis pantai sebesar 81.000 km. Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan. Dengan melimpahnya sumber daya ikan maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam realita tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan.

Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratannya merupakan salah satu provinsi wilayah maritim yang memiliki panjang garis pantai 2.367,6 km dengan luas wilayah 251.810 km². Dimana sekitar 96% merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang berupa gugusan pulau yang berjumlah 2.408 buah pulau yang ada di Indonesia terdiri dari 5 Kabupaten meliputi Kabupaten Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga dan 2 Kota yaitu Kota Batam dan Tanjungpinang (Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, 2017). Potensi alam laut ini merupakan andalan kekayaan yang dimiliki Kepri dalam menjawab tantangan perkenomian berbasis maritim dengan potensi ini Provinsi Kepri dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya masyarakat pesisir yang termarjinalkan di Indonesia.

Beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan untuk meminimalisasi dampak negatif pembayaran non tunai antara lain: (i) re-definisi kembali besaran moneter guna mengakomodasi perkembangan alat pembayaran non tunai; (ii) peningkatan kredibilitas bank sentral yang baik yang didukung dengan struktur neraca yang sehat dan ketersediaan cadangan devisa yang cukup diperlukan agar upaya bank sentral melakukan operasi pengendalian moneter tetap dapat dilakukan secara optimal dalam menjaga stabilitas harga; (iii) khusus untuk pengembangan e-money, penguatan giro wajib minimum bagi penerbit, restriksi dalam pemberian izin penerbitan e-money dan penyusunan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terkait dapat dipertimbangkan guna mengatur peredaran dan mengurangi risiko.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan program BI yang direalisasikan untuk mengefisienkan biaya transaksi, menghindari transaksi ekonomi yang tidak tercatat, mengurangi risiko uang rusak, dan mengatasi peredaran uang palsu. Untuk meningkatkan efisiensi dari GNNT dan memfokuskan kegunaannya di bagian sektor maritim. Maka peneliti menciptakan suatu inovasi bernama *E-fish pay (Electronic Fish Pay)*.

LANDASAN TEORI

Hasil Produksi Perikanan Tangkap Indonesia

Pembangunan sumber daya kelautan pada saat ini menjadi andalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis multi dimenasi yang mulai mendera kehidupan berkebangsaan kita. Pada saat ini basis perekonomian Indonesia masih dalam tahap *factors driven economy*, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada faktor sumber daya alam. Padahal ketersediaan sumber daya alam, khususnya yang berada didarat yang semakin menipis, sehingga satu satunya alternatif yang tersedia untuk memelihara keberlangsungan pembangunan, sebelum beralih ke tahap *innovation driven economy*, adalah pemanfaatan sumber daya dipesisir dan lautan (Fatmasari, 2014).

Produki perikanan Indonesia hingga triwulan III-2015 mencapai 14,79 juta ton. Produksi tersebut merupakan kontribusi dari produksi perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton dan

produksi perikanan tangkap di perairan umum mencapai 325 ribu ton. Produksi perikanan Indonesia dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26 persen dengan rata-rata produksi sebesar 4,93 juta ton dan standar deviasi sebesar 620 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan Indonesia secara total mengalami peningkatan dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015. Dengan perincian sebagai berikut: produksi perikanan tangkap dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,36 persen dengan rata-rata produksi sebesar 1,57 juta ton dan standar deviasi 162 ribu ton, sedangkan produksi perikanan budidaya dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,69 persen dengan rata-rata produksi sebesar 3,35 juta ton dan standar deviasi 461 ribu ton (KKP, 2015).

Kehidupan Masyarakat Pesisir

Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.

Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami *overfishing* (tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang di peroleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan.

Untuk itu, perlu dipikirkan solusi strategi alternatif untuk mengatasi persoalan kehidupan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Dalam hal ini, program jaminan sosial (*sosial security*) yang dirancang secara formal merupakan salah satu strategi yang patut (Fatmasari, 2014).

Ketergantungan Masyarakat Pesisir terhadap Tengkulak

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi oleh nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan. Permasalahannya adalah selain minimnya hasil tangkapan dengan alat tangkap sederhana, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para juragan juga cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh.

Dalam beberapa kasus, dan ini yang paling sering terjadi, bagi hasil itu dilakukan dengan sistem *fifty-fifty*, yaitu sesudah hasil tangkapan dijual dan dikurangi untuk biaya operasi, sisanya dibagi dua antara buruh nelayan dengan juragannya. Sistem bagi hasil seperti itu sepintas

memang kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh sistem bagi hasil yang demikian sebetulnya sangat timpang. Memang benar nelayan buruh dapat bagian setengah seperti yang diperoleh juragan, tetapi pada nelayan buruh, pendapatan yang setengah itu harus dibagi lagi dengan banyaknya anggota yang ada. Jika dalam satu kelompok penangkapan terdiri dari jenam anggota, maka dapat dipastikan bahwa pendapatan buruh hanyalah seperenam dari pendapatan juragan. Artinya, semakin besar anggota kelompok penangkapan yang dimiliki, maka ketimpangan dalam bagi hasil itu semakin besar.

Sistem bagi hasil yang timpang itu pada kasus-kasus tertentu masih diperparah dengan kewajiban nelayan untuk ikut serta menanggung penggantian alat baru, jika terjadi kerusakan. Ini dapat dilihat pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada perahu slerek di Muncar misalnya, jika terjadi kerusakan mesin ataupun jaring, dan ternyata tidak dapat diperbaiki, maka anggota slerek harus ikut menanggung setengah bagian dari harga pembelian mesin atau jaring yang diganti (Imron, 2002:59). Hal yang sama juga terjadi pada nelayan *purse seine* di Rembang. Lebih dari itu, para buruh *purse seine* di Rembang juga harus ikut menanggung biaya penyusutan alat tangkap yang dimiliki oleh juragan (Imron, 2002:80). Hal itu tentu saja tidak *fair*, karena alat yang dibeli itu sepenuhnya menjadi milik juragan, dan para buruh tidak ikut memilikinya. Dengan pembebanan penggantian alat baru, ditambah dengan keharusan untuk menanggung biaya penyusutan yang tentunya masuk ke kantong juragan, maka pendapatan para buruh akan menjadi semakin kecil, sebaliknya pendapatan juragan akan semakin besar. Itulah sebabnya kondisi ekonomi antara nelayan juragan dan buruh terdapat kesenjangan yang sangat besar.

Konsekuensi dari keadaan itu, tidak ada posisi tawar dari nelayan terhadap apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal, kecuali menjual hasil tangkapan yang lebih murah bahkan di bawah harga pasar. Keadaan itu pula yang menyebabkan pendapatan nelayan peminjam sulit berkembang dengan maksimal (Imron, 2003).

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami ketertinggalan diberbagai bidang. Indonesia harus berjuang melakukan pembenahan diberbagai bidang. Dibidang keuangan, khususnya dalam hal sistem pembayaran, jika dibandingkan dengan negara-negara sekawasan (regional), Indonesia masih jauh tertinggal. Salah satu bentuk ketertinggalan Indonesia dalam sistem pembayaran adalah rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi yang diindikasikan melalui rendahnya jumlah dan frekuensi transaksi non tunai. Jumlah transaksi non tunai ritel Indonesia baru mencapai 0,6 %, padahal negara sekawasan lain seperti Thailand sudah mencapai 2,8 %, Malaysia 7,7 % dan Singapura mencapai 44,5.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk memacu peningkatan transaksi non tunai, yaitu salah satunya oleh Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia. Salah satu program yang telah dijalankan adalah pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardjoyo. Pencanangan gerakan ini merupakan penyegaran kembali Peraturan Pemerintah no 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Layanan Keuangan Digital.

Melalui GNNT diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi

publik, seperti TransJogja, TransSolo, dan TransJakarta. Beberapa strategi GNNT yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Kawasan Non Tunai di Lingkungan Kampus. Program ini merupakan program yang tepat untuk perintisan, namun kelemahan program ini baru menyentuh sedikit lapisan masyarakat karena kampus secara proporsi tidak lebih dari 1 % masyarakat Indonesia. Apalagi dalam program ini baru menyentuh beberapa universitas negeri, padahal di Indonesia ada ribuan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. (2) Instrumen Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, BI akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran (Sutarmin dan Adi Susanto, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat (Bungin, 2009:68).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kjang, dengan pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian karena: Peneliti menemukan potensi produksi tangkap hasil laut yang besar, Merupakan jalur keluar- masuknya kegiatan Ekspor dan Impor; Peneliti masih menemukan kesenjangan perekonomian nelayan tangkap di wilayah sekitar dan Menemukan ketergantungan nelayan tangkap kepada tengkulak.

Informan/Narasumber

Informan merupakan orang yang memberikan informasi dan memberikan keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Suharsimi, 2007:146).

Kategori Informan dalam penelitian:

1. Staff yang bekerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.
2. Staff UPT Perikanan di wilayah Kijang.

Jumlah informan yang ingin diteliti:

1. Staff di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan: 1 Orang
2. Staff UPT Perikanan di wilayah Kijang: 1 Orang
3. Nelayan Tangkap: 4 Orang

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan wawancara tentang kegiatan dan keadaan masyarakat pesisir di Kelurahan Sei Enam.
2. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara namun melalui dokumen- dokumen dan literatur, data dari kelurahan seperti data kependudukan masyarakat di Ke, serta buku- buku teori dan sebagainya yang menunjang dan berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik dan Alat Pengumpulan

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi/ Pengamatan

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah informan yang diteliti cukup tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini, pada waktu pengumpulan data di lapangan peneliti juga akan ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancara. (Bungin, 2009; 108).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan Kelurahan yakni Staff Kelurahan. Alatnya dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Empat tahap dalam proses analisis data ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan juga temuan tentang apa saja yang dijumpai selama penelitian (Bungin, 2009: 108).

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses yang peneliti melakukan pemilahan dan penyerdehanaan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat halus dan siap pakai setelah dilakukan penyeleksian dengan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang sudah direduksi juga akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah penelitian untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya (Bungin, 2009: 115).

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti untuk melihat hubungan antara detail yang ada, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan sebab hasil penelitian masih berupa data- data yang berdiri sendiri- sendiri. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis menyajikan data yang diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai gambaran dari hasil yang telah penulis lakukan pada saat wawancara, sehingga menjadi paduan informasi tentang apa yang terjadi dan data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti (Bungin, 2009:121).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kecamatan Bintan Timur

Kabupaten Bintan terletak antara 0°6'17" Lintang utara - 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur disebelah barat - 108°2'27" Bujur Timur disebelah Timur. Daerah kabupaten bintan merupakan dari paparan continental yang terkenal dengan nama "Paparasi Sunda". Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier, wilayahnya membentang dari semenanjung Malaysia dibagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan.

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

Utara	: Kabupaten Natuna
Selatan	: Kabupaten Lingga
Barat	: Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
Timur	: Provinsi Kalimantan Barat

a. Hasil Tangkap Perikanan Di Bintan Timur

Volume Produksi Perikanan per kecamatan di Kabupaten Bintan 2016 (Ton)

No.	Kecamatan	Penangkapan (2016)
1	Teluk Bintan	2.464,00
2	Seri Kuala Lobam	2.415,69
3	Bintan Utara	1.884,24
4	Teluk Sebong	3.381,97
5	Bintan Timur	13.044,73
6	Bintan Pesisir	7.536,95
7	Mantang	6.957,19
8	Gunung Kijang	7.440,33
9	Toapaya	-
10	Tambelan	8.213,35
Total		53.338,45

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan (2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa volume produksi perikanan di Kabupaten Bintan pada tahun 2016, sejumlah 53.338,45 ton yang terbagi atas beberapa kecamatan yang tertera di tabel diatas dengan jumlah terbesar terdapat di wilayah Bintan timur dengan jumlah tangkapan hasil laut sebesar 13.044,73 ton.

Perbandingan volume penangkapan ikan di Kabupaten Bintan periode 2012 – 2016 (Ton):

Tahun	Penangkapan
2012	39.937,00
2013	41.238,00
2014	49.339,00
2015	50.287,00
2016	53.338,44

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Berdasarkan hasil tabel diatas juga dapat diketahui bahwa hasil jumlah hasil tangkapan laut dari periode tahun 2012- 2016 mengalami peningkatan berturut turut. Hingga pada tahun 2016 diketahui bahwa hasil tangkapan yang di peroleh di Kabupaten Bintan sebesar 53.338,44 ton.

Kondisi Perekonomian Masyarakat Pesisir di Sei Enam

Kondisi perekonomian merupakan keadaan yang memiliki serangkaian sistem yang saling berhubungan dan dapat mempengaruhi antar bagian secara keseluruhan. Lebih tepatnya kondisi yang bisa terjadi apabila keadaan perkenomian masyarakatnya rendah maka akan mempengaruhi kemakmuran wilayahnya. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti berusaha untuk menggali bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di wilayah Kelurahan Sei Enam khususnya perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tangkap. Karena peneliti melihat bahwa masih rendahnya taraf perekonomian masyarakat sekitar tersebut, sementara hasil tangkapan di wilayah tersebut merupakan hasil tangkapan terbesar di Kabupaten Bintan.

Menurut Bapak SF sebagai kepala UPT Kijang mengatakan bahwa memang benar hasil tangkapan laut di wilayah Kijang yang meliputi Sei Enam dan sekitarnya merupakan wilayah penghasil tangkapan tertinggi di Kabupaten Bintan. Namun, ini tidak hanya hasil tangkap laut dari nelayan mandiri, tetapi juga hasil tangkapan nelayan yang bekerja dengan tengkulak. Hal inilah yang menurut Bapak SF juga sebagai kendala dari rendahnya perekonomian masyarakat sekitar.

Menurut Bapak MD sebagai nelayan tangkap di wilayah Sei Enam mengatakan bahwa untuk melaut mereka harus melakukan peminjaman terlebih dahulu untuk membeli bahan bakar dan makanan untuk persediaan selama melaut. Pinjaman yang di pinjam biasanya kisaran 1.500.000, setelah mendapatkan peminjaman Bapak MD akan segera turun kelaut bersama ke empat temannya dengan menggunakan kapal 3 GT. Biasanya mereka melaut selama 3 hari. Apabila hasil tangkapan laut dirasa cukup banyak maka mereka akan kembali pulang kerumah.

Hasil tangkapan ikan yang biasa di peroleh seperti ikan selar, ikan tenggir, ikan selikor. Dan biasanya bisa mendapatkan kisaran 5000.000 dari hasil menjual tangkapan laut tersebut. Namun, harus di bagi 5 dengan nelayan yang ikut melaut bersama, serta di potong untuk pembayaran hutang supaya hutang pinjaman tidak menumpuk. Sehingga menurut Bapak MD, penghasilan yang ia dapat hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun terkadang kurang, sehingga ia tidak bisa melakukan *saving* atau menabung dan nelayan juga tidak dapat menyisihkan penghasilannya untuk modal melaut selanjutnya karena terlalu banyaknya potongan pendapatan yang harus di tanggung oleh nelayan.

Ketergantungan Masyarakat Sei Enam terhadap Tengkulak

Di wilayah Sei Enam sebagian masyarakatnya sudah mencari hasil tangkapan secara mandiri jadi mengenai alat tangkap dan sampan mereka memanfaatkan sumbangan yang di berikan pemerintah, namun untuk melaut mereka tetap menemukan beberapa kendala. Selama melaut sekitar seminggu, mereka membutuhkan biaya operasional berupa konsumsi selama dilaut dan membeli bahan bakar serta perlengkapan melaut lainnya, karena ketidakpunyaan biaya, nelayan harus menemui tengkulak untuk melakukan peminjaman uang sekitar 1.000.000,- hingga 2.000.000,- untuk modal melaut selama seminggu. Tengkulak pun akan meminjamkan uang kepada nelayan, sehingga nelayan akan menjual hasil tangkapannya tersebut kepada tengkulak.

Menurut SA yang kami wawancarai, ia mengatakan bahwa ikan yang dijual ke tengkulak relative lebih rendah daripada menjual hasil tangkapan ke pasar, selisih harganya bisa sekitar 10ribu perkilo ikan. Namun, karena rasa segan dan ketergantungan dari segi dana kepada tengkulak inilah menyebabkan nelayan tetap menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak, walaupun mereka harus menerima pembayaran yang lebih rendah ketimbang menjual hasil tangkapan ke pasar.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Melalui GNNT diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi publik, seperti TransJogja, TransSolo, dan TransJakarta. Beberapa strategi GNNT yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Kawasan Non Tunai di Lingkungan Kampus. (2) Instrumen Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, BI akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. (Sutarmin dan Adi Susanto, 2017).

E-Fish Pay

Untuk mengefektifkan dan meningkatkan keefisienan dari GNNT maka peneliti membuat inovasi yang terdapat dalam bentuk *E-Fish Pay* yang memiliki manfaat dan keunggulan, yaitu menghilangkan ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, media untuk menabung (*saving*), untuk berinvestasi (*investment*) dalam mengembangkan hasil tangkapan demi keberlanjutan, kemandirian dan peningkatan perekonomian nelayan pesisir.

Siklus *E-Fish Pay*:

- a. Nelayan melakukan penjualan hasil tangkapan ikan melalui pemerintah kepada pihak swasta (restaurant, swalayan, dll).
- b. Pihak swasta dan pemerintah melakukan pembayaran dari pembelian hasil tangkapan ikan tersebut langsung ke rekening *E-Fish Pay* milik nelayan.
- c. Kemudian dari sistem *E-Fish Pay* ini, seluruh penghasilan nelayan akan langsung dipotong dengan *saving* dan *investment*. Barulah nelayan akan mendapatkan penghasilan bersih.
- d. Nelayan dapat menggunakan *investment* hanya untuk kegiatan perekonomian, contohnya untuk perbaikan kapal. Pembuatan keramba dan lain-lain.
- e. Pemerintah menjalankan perannya sebagai *controlling*. Pengawasan yang dilakukan pemerintah meliputi pengawasan kegiatan antara nelayan dan perbankan, memperhatikan kesejahteraan nelayan, serta pengawasan secara berkala terhadap perkembangan sistem ini.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang peneliti analisis di wilayah Kecamatan Gunung Kijang, tepatnya di daerah pesisir dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tangkap. Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat perekonomian yang menengah ke bawah.
- b. Ketergantungan kepada tengkulak.
- c. Minimnya modal.
- d. Pemahaman teknologi yang belum memadai.

Dari permasalahan di atas, adapun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan adalah suatu konsep yang memanfaatkan teknologi yang bersumber dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang peneliti namakan dengan *E-Fish Pay*. *E-Fish Pay* adalah suatu gagasan tentang bagaimana sistem pembayaran non tunai diterapkan pada sektor maritim yang pada hal ini ditujukan kepada masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan tangkap. *E-Fish pay* menawarkan keunggulan, yaitu :

1. *Saving* (Tabungan)

Yaitu tabungan yang merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam konsep *E-Fish Pay*, cara kerja *saving* adalah dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka minimal 15% dari penghasilan nelayan yang melakukan transaksi jual beli melalui sistem *E-Fish Pay*.

2. *Investment* (Investasi)

Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003:2). Dalam konsep *E-Fish Pay*, cara kerja *investment* adalah dengan menyisihkan 10% dari penghasilan nelayan yang melakukan transaksi jual beli melalui sistem *E-Fish Pay*. Namun untuk *investment* ini penghasilan yang telah disisihkan oleh nelayan hanya boleh di tarik atau digunakan untuk kelangsungan perekonomian nelayan, misal untuk pembuatan keramba atau membuka usaha-usaha yang akan dijalankan oleh nelayan selama tidak melaut.

Langkah-langkah yang harus diambil dalam memperkenalkan *E-Fish Pay*, sebagai berikut:

1. Merubah Persepsi Nelayan Tangkap

Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai pentingnya peningkatan perekonomian untuk mendukung kesejahteraan nelayan tangkap, juga memberikan sebuah pola pikir yang selama ini sudah tertanam bahwa nelayan cenderung bergantung kepada tengkulak, sehingga akibat kebergantungan tersebut menyebabkan para nelayan sulit untuk mandiri, memiliki banyak hutang, dan penghasilan yang rendah karena harga jual hasil tangkapan laut di bayar dengan harga yang murah.

2. Sistem Pengelolaan Pendapatan Nelayan Tangkap

Sistem pengelelolaan yang dapat di aplikasikan oleh nelayan adalah dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk *saving* dan *investasi* melalui *E-Fish Pay*, sehingga masyarakat pesisir dapat mengoptimalkan pendapatannya dan mengelola keuangannya secara baik. Melalui *E-Fish Pay* masyarakat pesisir dapat menggunakan dana *investasi* tersebut ke arah yang tepat seperti pembuatan keramba dan modal usaha yang berkaitan dengan maritim.

SIMPULAN

Melalui penelitian ini diketahui bahwa masyarakat pesisir Kecamatan Gunung Kijang yang bekerja sebagai nelayan tangkap pada dasarnya masih berada dalam taraf perekonomian yang rendah (tingkat kemiskinan) padahal seharusnya ketika musim tangkap ikan/ hasil laut berlimpah mereka bisa mendapatkan penghasilan yang besar, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini dikarena ketergantungan masyarakat pesisir kepada tengkulak sehingga ketika cuaca dalam keadaan buruk atau tidak bisa melaut maka nelayan akan kesulitan untuk memenuhi perekonomian ataupun kebutuhannya sehari-harinya tentu dengan demikian nelayan harus melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya, dan cara yang paling mudah adalah

melakukan peminjaman kepada tengkulak, sehingga ini menjadi alasan utama ketergantungan masyarakat pesisir kepada tengkulak dan kurang mandiri dalam meningkatkan pendapatan perekonomiannya.

Dengan adanya Gerakan Nasional Non Tunai di tujukan agar dapat mempermudah masyarakat pesisir yang diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada *e-pass* masuk-keluar pelabuhan.

Untuk mengembangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terhadap masyarakat di wilayah pesisir khususnya yang bekerja sebagai nelayan tangkap maka peneliti menawarkan sebuah terobosan yang merupakan inovasi dari GNNT yang lebih di fungsikan untuk bertransaksi dalam sektor kemaritiman, dengan tujuan supaya nelayan tangkap tidak merasa kebergantungan terhadap para tengkulak dan sekaligus memudahkan nelayan untuk melakukan transaksi baik dalam jual ataupun beli hasil tangkapan laut, mengajak nelayan untuk menabung sehingga dapat menyisihkan uang dari penghasilannya yang dapat di gunakan sewaktu- waktu ketika di perlukan, juga memberikan investasi dari pehasilan nelayan yang nantinya investasi yang terkumpul tersebut juga akan di kelolah dan di gunakan untuk nelayan yang ingin mengembangkan hasil tangkapnya dan menjadi lebih mandiri, yang dengan harapan *E- fish Pay* dapat mendukung masyarakat pesisir terutama para nelayan dalam meningkatkan perekonomiannya dan kesejahteraan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoriy N. & amp; Arbaningsih, D, 2008. Negara Maritim Nusantara : Jejak yang Terhapus, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bank Indonesia, (2016), Upaya Meningkatkan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money, Working Paper
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001. Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Fatmasari, Dewi., (2014), Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jurnal : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 6 No 1.
- Febranto, Wiangga 2008. "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non- Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia". Jurnal . Universitas Diponegoro. Semarang.
- Imron. Masyhuri., (2003), Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan, Jurnal : Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No 1.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, (2015) Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2015.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Buku Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan Perikanan Tahun 2011.
- Kertas kerja (working papers): Pramono, Bambang, dkk. 2006. Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter. Bank Indonesia Working Paper No. 11
- Sukamto, 2017. "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)" Jurnal. Universitas Yudharta Pasuruan.

E-Fish Pay (Electronic Fish Pay)
Kabupaten Bintan Kepulauan Riau

Solihin, Akhmad, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Isu, Permasalahan dan Telaah Kebijakan, Bandung: Nuansa Aulia.

Sutarmin, Susanto. Adi, (2017), Potensi Pengembangan Transaksi Non Tunai Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.